

LAPORAN KINERJA

2023

DIREKTORAT
BINA POTENSI



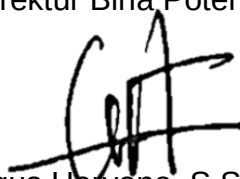
KATA PENGANTAR

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan manajemen kinerja merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah di era reformasi ini. Untuk mewujudkan agenda tersebut, sejak akhir tahun 1999, melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dan diperbaharui melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2014, telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan uang atau dana publik yang dibelanjakannya. Dalam Sistem AKIP, keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut.

Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Potensi tahun 2023 ini disusun dengan menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang Pembinaan Potensi. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi Direktorat Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya.

Dari laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pimpinan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja Direktorat Bina Potensi dalam melaksanakan tugas pembinaan di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2024
Direktur Bina Potensi,



Agus Haryono, S.S., M.B.A.
Pembina Utama Muda (IV/c)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Umum	1
2. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi	2
3. Struktur Organisasi.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
1. Umum	5
2. Ikhtisar Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024	6
A. Visi	6
B. Misi	6
C. Tujuan	7
D. Sasaran.....	7
E. Program	13
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT BINA POTENS.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
1. Umum	15
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	16
3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022	17
4. Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan	34
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	34
6. Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	35
B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP.....	37

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Bina Potensi	4
Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Direktorat Bina Potensi Tahun 2023	14
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Potensi	16
Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Ditbinpot dengan Tahun 2022	18
Tabel 3.3. Peserta Jambore Potensi SAR Tahun 2023	25
Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2022 Direktorat Bina Potensi	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. <i>Cascading</i> Tujuan dan Sasaran Direktorat Bina Potensi 2020–2024	11
Gambar 2.2. Cross cutting Sasaran Direktorat Bina Potensi 2020-2024	12
Gambar 3.1. Nilai SKM Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023.....	19
Gambar 3.2. Sambutan Presiden Joko Widodo	20
Gambar 3.3. Foto bersama Presiden, Menko PMK, Seskab, dan Kabasarnas	21
Gambar 3.4. Flyer Kegiatan FKP3 Tingkat Nasional Tahun 2023	22
Gambar 3.5. Pasukan Apel Jambore SAR Nasional Tahun 2023	23
Gambar 3.6. Peserta Jambore melakukan Fitness Drill.....	24
Gambar 3.7. Foto Pemenang Jambore SAR Nasional	25
Gambar 3.8. Foto Kegiatan Penyusunan Juknis Penyuluhan	26
Gambar 3.9. Foto Kegiatan Penyusunan Pedoman Seragam Tugas	27
Gambar 3.10. Foto Pembuatan Modul Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan	29
Gambar 3.11. Kegiatan SAR Goes to School di Tahun 2023	30
Gambar 3.12. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Tahun 2023	32
Gambar 3.13. Kegiatan SAR Community Tahun 2023	33

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tuntutan masyarakat makin meningkat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Salah satu perwujudan *Good Governance* adalah hasil pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebagaimana diperkuat dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menentukan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Direktorat Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan yang merupakan bagian dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pembinaan potensi, serta membina dan mengkoordinasikan kesiapan potensi pencarian dan pertolongan sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 03 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Posisi Indonesia secara geografis berada diantara dua benua dan dua samudra sehingga menjadi pertemuan dan persimpangan arus pelayaran dan penerbangan antar negara. Oleh karenanya potensi terjadinya musibah di bidang penerbangan dan pelayaran tinggi. Selain itu, secara geologis Indonesia berada pada jalur api dan pertemuan dua lempeng bumi yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia yang rawan terjadinya bencana alam berupa gempa bumi, tsunami dan gunung meletus.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mengantisipasi hal tersebut terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang SAR baik internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan maupun untuk potensi SAR. Sesuai Undang-Undang No.29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan pertolongan serta Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian Potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya.

Direktorat Bina Potensi adalah unit kerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi, bimbingan dan penyuluhan, serta pelaporan di bidang bina potensi pencarian dan pertolongan.

Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas KKN serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah revisi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menentukan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan diatas, Direktorat Bina Potensi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2023.

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

A. Kedudukan

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 03 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Direktorat Bina Potensi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

B. Tugas dan Fungsi

Direktorat Bina Potensi mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi, bimbingan dan penyuluhan, serta pelaporan di bidang bina potensi pencarian dan pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Bina Potensi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pencarian dan pertolongan;

- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang bina pencarian dan pertolongan;
- 3) pelaksanaan pembinaan bidang bina pencarian dan pertolongan;
- 4) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi bidang bina pencarian dan pertolongan;
- 5) penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengembangan potensi pencarian dan pertolongan;
- 6) pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan;
- 7) pelaksanaan sertifikasi potensi pencarian dan pertolongan;
- 8) pemasyarakatan pencarian dan pertolongan meliputi bimbingan, penyuluhan dan diseminasi;
- 9) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina potensi; dan
- 10) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

3. Struktur Organisasi

Dengan adanya penyederhanaan organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Direktorat Bina Potensi dikepalai oleh Direktur Bina Potensi dan dibantu oleh jabatan-jabatan fungsional di bawahnya. Adapun stuktur organisasi Direktorat Bina Potensi adalah sebagai berikut

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA POTENSI



Tabel 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Bina Potensi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT BINA POTENSI

1. Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*) yang disebut SAR. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional.

Dalam meningkatkan pelayanan Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dituntut membuat suatu perencanaan yang mempunyai perspektif lebih panjang, karena berbagai masalah yang dihadapi saat ini baik yang menyangkut kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan peralatan, sistem SAR nasional, koordinasi dan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat memerlukan penanganan secara bertahap agar hasil yang dicapai bisa membawa nama Basarnas semakin baik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk membuat suatu rencana kebijakan jangka panjang tersebut maka dibuatlah Rencana Strategis Basarnas 2020 – 2024 sebagai dasar acuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pengembangan kelembagaan Basarnas, hukum dan kewenangan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, sarana prasarana, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama nasional dan internasional serta dalam rangka pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang terlaksana secara terpadu dengan program pembangunan nasional dan bersifat komprehensif dan responsif terhadap perkembangan lingkungan serta berpegang kepada pendekatan yang sistemik.

2. Ikhtisar Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Bina Potensi Tahun 2020 – 2024

A. Visi

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

“Menuju Pencarian dan Pertolongan yang Andal dan Efektif dalam Mendukung Perwujudan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Yang Maju, Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Adapun visi dari Direktorat Bina Potensi adalah ***“Terwujudnya Potensi Pencarian dan Pertolongan yang Kompeten, Andal, dan Tersertifikasi dalam mendukung keberhasilan operasi Pencarian dan Pertolongan.”***

B. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta penjabaran dari Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, terutama Misi ke-7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, serta dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing dan Misi ke-3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka ditetapkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 untuk bidang Pembinaan Potensi sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan, menyiapkan, dan mensertifikasi potensi pencarian dan pertolongan serta melalui diseminasi guna mendukung terwujudnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan;**

2. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan potensi pencarian dan pertolongan yang sesuai dengan perkembangan dan situasi guna terwujudnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan;

C. Tujuan

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut, Direktorat Bina Potensi merumuskan tujuan mengikuti Tujuan Pembangunan (TP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai berikut:

- TP.1. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional;**
- TP.2 Tersedianya sarana prasarana dan Bina Potensi yang andal**

D. Sasaran

Sesuai pasal 1 (17) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) didefinisikan sebagai hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Lebih lanjut, dalam Permen PPN/Ka Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan renstra yang menyebutkan 3 nomenklatur sasaran, yakni:

1. Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
2. Sasaran Program (SP) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis K/L yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
3. Sasaran Kegiatan (SK) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk periode pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS, SP, dan SK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC), maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam konteks ini, maka Sasaran Nasional (SN) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada level *stakeholders perspectives* merepresentasikan pencapaian Sasaran Nasional (SN) dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk

mewujudkannya. Sesuai dengan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), maka Sasaran Nasional (SN) terkait dengan bidang pencarian dan pertolongan adalah:

SN Meningkatnya kinerja layanan pencarian dan pertolongan

2. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

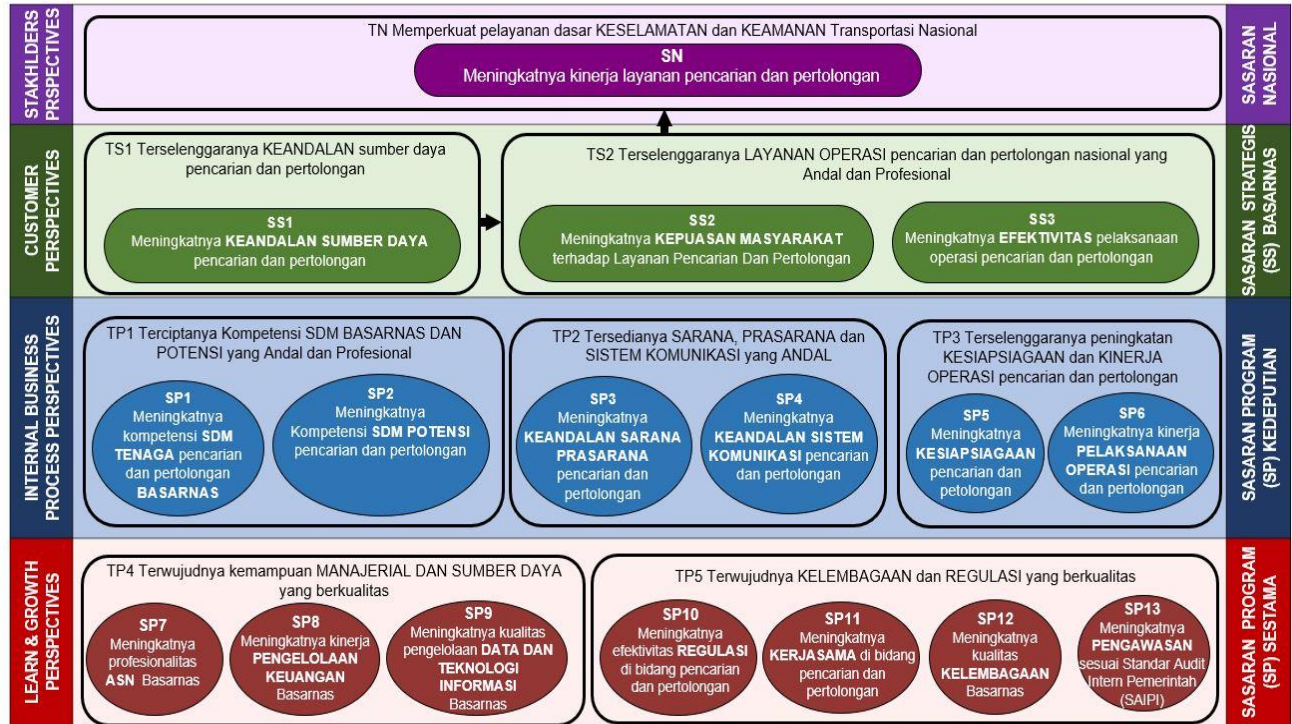
Oleh karena itu, di dalam BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang terkait dengan pembinaan potensi untuk periode 2020-2024 adalah SS.1 yakni Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan

3. *Internal Business Process*

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi ke deputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.

Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)). Sehingga dalam perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini, Sasaran Program (SP) yang sesuai dengan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan adalah di SP.2 yakni Meningkatnya kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan.

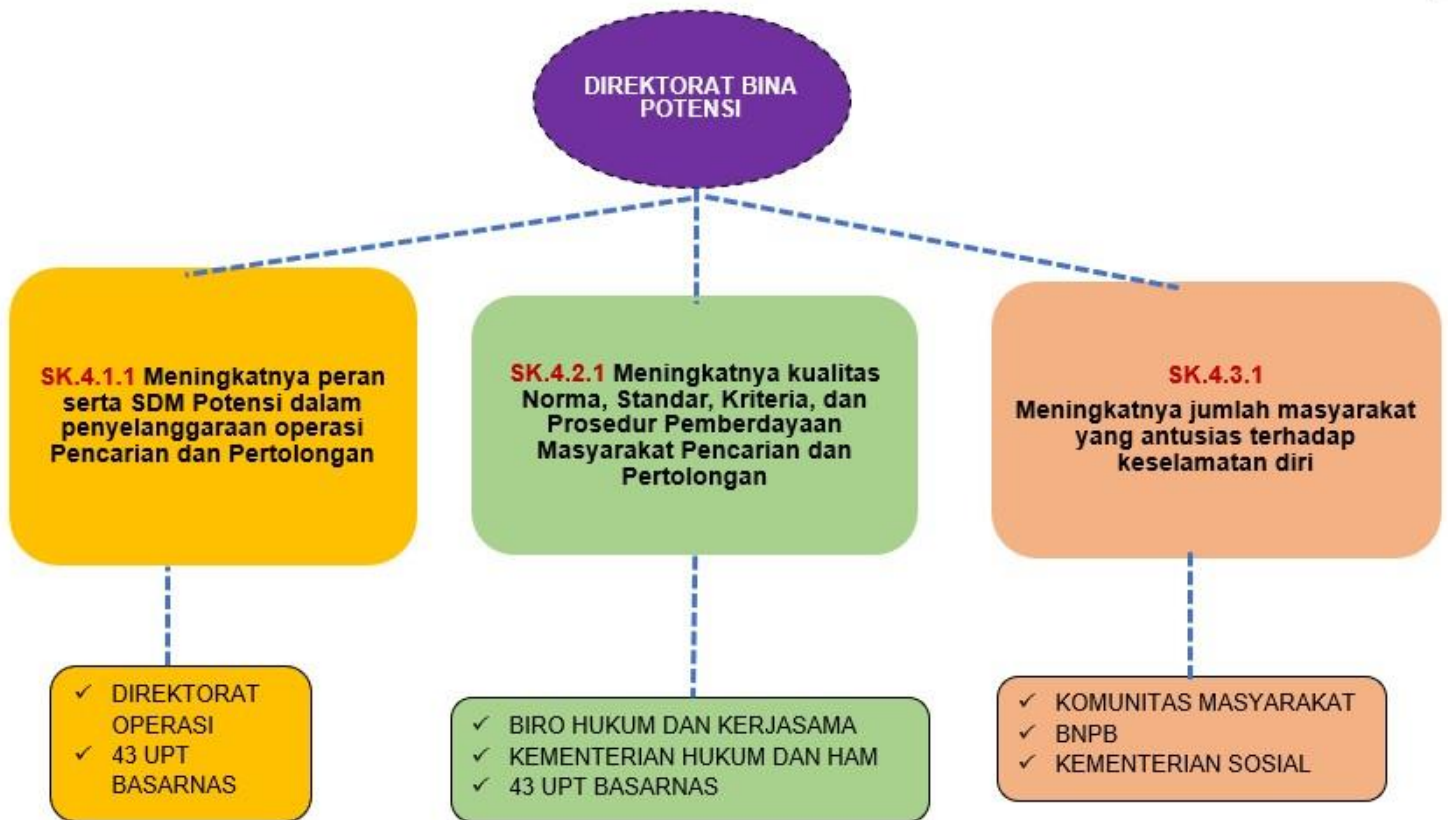
TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT BINA POTENSI



Gambar 2.1. Cascading Tujuan dan Sasaran Direktorat Bina Potensi 2020–2024



Gambar 2.2. *Cross Cutting* Sasaran Direktorat Bina Potensi 2020–2024

E. Program

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktur Bina Potensi mempunyai program utama yang akan dilaksanakan, yaitu: **“Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana”**

3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja dalam pelaksanaan tugas yang tertuang dalam penetapan. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pada tahun 2023, Direktur Bina Potensi telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Direktorat Bina Potensi disusun dengan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	88
		Persentase kenaikan jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan	100%
2	Meningkatnya kualitas Norma, Standar, Kriteria, dan Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	Persentase NSPK Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan yang tersusun	100%
3	Meningkatnya jumlah masyarakat yang antusias terhadap keselamatan diri	Tingkat Partisipasi Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	100%

Tabel 2.1. Tabel Penetapan Kinerja Direktorat Bina Potensi Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT BINA POTENSI

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Umum

Akuntabilitas kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada hasil akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan adanya informasi mengenai hasil-hasil yang diperoleh. Hasil-hasil yang diperoleh tersebut kinerjanya harus diukur sampai sejauh mana pencapaiannya melalui pengukuran kinerja. Berdasarkan analisis terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Direktorat Bina Potensi.

Secara garis besar capaian kinerja Direktorat Bina Potensi dapat dikatakan baik sudah memenuhi target capaian kinerja, yaitu dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100%.

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Bina Potensi Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran beserta capaiannya. Secara umum kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai prosentase nilai capaian kinerja yang cukup baik. Hasil evaluasi kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (IKK).

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	88	88	100%
Persentase kenaikan jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	130%	130%
Persentase NSPK Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan yang tersusun	100%	100%	100%
Tingkat Partisipasi Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	100%	108%	108%

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Potensi

Indikator tersebut didukung oleh 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 1 (satu) sasaran program. Sasaran tersebut antara lain adalah: (1) Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan; (2) Meningkatnya kualitas Norma, Standar, Kriteria, dan Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan; (3) Meningkatnya jumlah masyarakat yang antusias terhadap keselamatan diri.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun 2022

Berdasarkan sasaran yang menjadi fokus kegiatan Direktorat Bina Potensi Tahun Anggaran 2023, pengukuran pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2022		2023	
	%			
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	-	-	88	88
Persentase Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diimplementasikan diubah menjadi Persentase NSPK Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan yang tersusun	100	100	100	100
Persentase keterlibatan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan diubah menjadi Persentase kenaikan jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan	100	99,5	100	130
Persentase data Potensi Pencarian dan Pertolongan yang mutakhir secara berkala	100	100	Penyesuaian indikator kinerja	

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2022		2023	
	%			
Persentase SDM Potensi yang memahami penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan <i>diubah menjadi</i> Tingkat Partisipasi Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	100	100	100	108

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Bina Potensi dengan Tahun Sebelumnya

Dari tabel diatas dapat dilihat, target kinerja yang ditetapkan digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran dipenuhi dengan tingkat masing-masing indikator yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan

Adapun kegiatan-kegiatan untuk mendukung indikator tersebut antara lain dengan Pengelolaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat T.A. 2023 tentang Layanan Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja unit layanan pembinaan potensi dimaksudkan sebagai upaya mengevaluasi kinerja unit layanan Direktorat Bina Potensi secara terukur. Hasil pengukuran kinerja unit layanan Direktorat Bina Potensi dilaksanakan bertujuan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kinerja unit, pelayanan pada suatu waktu tertentu maupun secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan indeks tingkat kesadaran masyarakat akan pencarian dan pertolongan dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan pembinaan potensi.

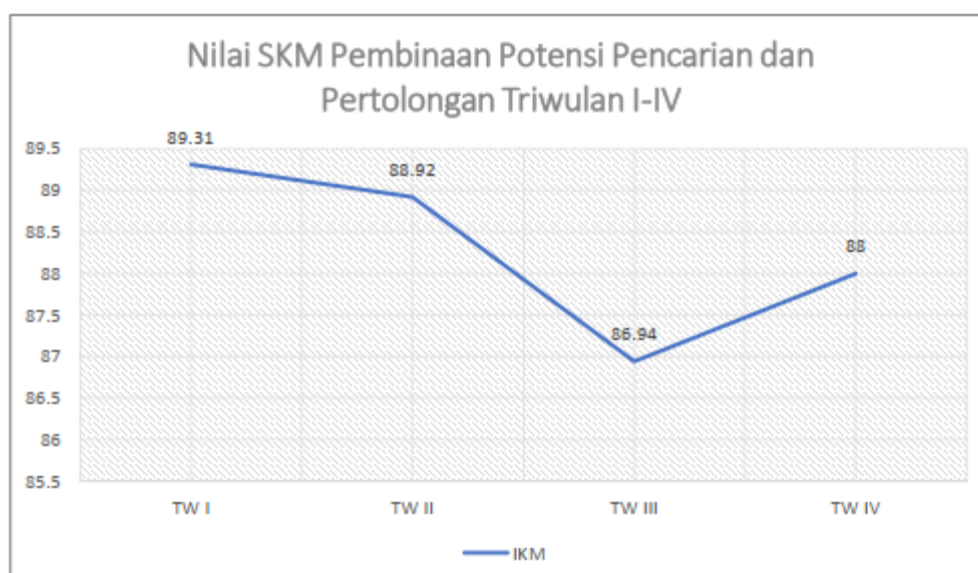
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar:

- ✓ Masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan penilaian kinerja Direktorat Bina Potensi;

- ✓ Mendorong Direktorat Bina Potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- ✓ Mengukur tingkat kepuasan dan kesadaran masyarakat akan pencarian dan pertolongan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 yang dapat disampaikan yaitu:

- ✓ hasil revidi Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat Bina Potensi Sesuai dengan Permenpan RB No.14 Tahun 2017;
- ✓ Dalam penyusunan kuesioner survei, nilai unsur tidak boleh berubah, namun untuk pertanyaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
- ✓ Survei dilakukan untuk masing-masing jenis layanan, dengan memperhatikan standar pelayanan;
- ✓ Pelaporan SKM sebaiknya dilaksanakan secara berkala 4 kali dalam 1 tahun



Gambar 3.1. Nilai SKM Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Triwulan III hingga Triwulan IV 2023 pada Unit Layanan Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

b. Persentase kenaikan jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan

Adapun kegiatan-kegiatan untuk mendukung indikator tersebut antara lain:

1) Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Tingkat Nasional

FKP3 Tingkat Nasional tahun 2023 diselenggarakan demi melaksanakan fungsi pembinaan melalui pengendalian dengan menyelenggarakan wadah komunikasi dan koordinasi bagi seluruh potensi pencarian dan pertolongan.

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan Forum Koordinasi Potensi Pencarian Dan Pertolongan Tingkat Nasional adalah untuk:

- ✓ Menyampaikan informasi, melakukan sinkronisasi, dan mengevaluasi pembinaan potensi pencarian dan pertolongan
- ✓ Melakukan evaluasi dukungan potensi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan
- ✓ Mengidentifikasi masalah dan pembahasan lain sesuai dengan bidang pencarian dan pertolongan.



Gambar 3.2. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pembukaan Rapat Kerja BASARNAS dan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Tingkat Nasional



Gambar 3.3. Foto bersama Menko PMK, Presiden RI, Kabasarnas, dan Seskab di Lapangan Utama kantor pusat BASARNAS

Kegiatan Forum Koordinasi Potensi Pencarian Dan Pertolongan Tingkat Nasional tahun 2023 mengusung tema “Cepat Tanggap Selamatkan Jiwa” serta diadakan pada tanggal 16 Februari 2023 di Ruang Serbaguna Dono Indarto, Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kegiatan ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo serta dihadiri oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, dan seluruh pejabat tinggi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Kegiatan tahun ini menghadirkan 8 (delapan) narasumber:

1. Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Fajar Hutomo, S.T., M.M.T., CFP;
2. VP Mining Safety PTFI, Dr. Ir. Eman Widiyanto, S.T., MASc., IPU;
3. Rektor Universitas Budi Luhur, Dr. Ir. Wendi Usino, M.M., M.Sc., Pd.D.
4. Executive VP K3 Keamanan Lingkungan PT PLN (Persero), Ir. Komang Parmita, M.Eng.Sc.;
5. Manager News Gathering TV One, Cahyo Junaedy;
6. Pegiat SAR Jawa Barat, Darmanto;
7. Penyintas SAR, Budi;

8. Direktur Bina Potensi



Gambar 3.4. Flyer Kegiatan FKP3 Tingkat Nasional Tahun 2023

HASIL DAN REKOMENDASI FKP3 NASIONAL

- a. Hasil pembahasan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Nasional, antara lain:
 - ✓ Kolaborasi Pentahelix masing-masing memiliki peran dalam tugas dan fungsinya dimana pemerintah berperan dalam menyiapkan regulasi dan dukungan yang diperlukan untuk penyelenggaraan SAR;
 - ✓ Industri dan swasta diharapkan dapat menyiapkan peralatan dan teknologi yang diperlukan dalam penyelenggaraan SAR;
 - ✓ Akademisi diharapkan dapat berperan dalam memberikan dukungan dengan melakukan riset dan memberikan solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan SAR;
 - ✓ Media diharapkan untuk memberikan informasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat tentang situasi dan bencana serta penyelenggaraan SAR yang sedang berlangsung; serta
 - ✓ Kolaborasi bersama Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam Menyatukan Visi dan Misi dalam Pelaksanaan Operasi SAR.
- b. Rekomendasi
 - ✓ Semua unsur dapat memberikan sumbangsih terbaik sesuai dengan kompetensinya untuk misi kemanusiaan;

- ✓ Diharapkan semua unsur dapat menjadikan sebuah ekosistem dan dapat mengikis ego sistem.

2) Jambore Potensi SAR Tingkat Nasional

Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Oleh karena itu untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan diperlukan sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan yang memiliki keahlian atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan. Untuk memberikan keahlian dan/atau kompetensi diperlukan kegiatan pembinaan dalam bentuk Jambore SAR Nasional.

Kegiatan ini merupakan wadah bagi potensi dari seluruh Indonesia yang dipilih oleh 43 Kantor SAR untuk mengikuti penyegaran pengetahuan di bidang pencarian dan pertolongan dan kegiatan lomba sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para potensi yang telah mengikuti pembinaan maupun uji kompetensi.



Gambar 3.5. Pasukan Apel Jambore SAR Nasional Tahun 2023

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan Jambore Potensi SAR Tingkat Nasional Tahun 2023 adalah untuk:

- ✓ Menyamakan persepsi, baik pola pikir maupun pola tindak Potensi SAR dalam mendukung pelaksanaan operasi SAR sesuai amanat UU No. 29 Tahun 2014;
- ✓ Membangun kerjasama tim yang solid dan kebersamaan dengan semangat “Quick Action Satu Jiwa Satu Rasa”
- ✓ Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (skill) teknis SAR serta upaya mentransformasikan ilmu SAR kepada Potensi SAR;
- ✓ Membangun jaring komunikasi, koordinasi, serta silaturahmi antar Potensi SAR dan Basarnas.



Gambar 3.6. Peserta Jambore SAR Nasional melaksanakan Fitness Drill

Kegiatan Jambore Potensi SAR Tingkat Nasional diselenggarakan pada tanggal 25 s.d. 30 November 2023 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh 43 UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan BASARNAS seluruh Indonesia. Adapun kontingen yang mengikuti Jambore Potensi SAR Tahun 2023 berjumlah 688 orang yang terdiri dari:

No.	Kontingen	Jumlah
1.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan	43 org
2.	Kasi/Kasubsi Sumber Daya	43 org
3.	Petugas Medis	43 org
4.	Petugas Humas	43 org
5.	Instruktur	86 org
6.	Potensi SAR	430 org

Tabel 3.3. Peserta Jambore Potensi SAR 2023



Gambar 3.7. Foto pemenang Jambore SAR Nasional

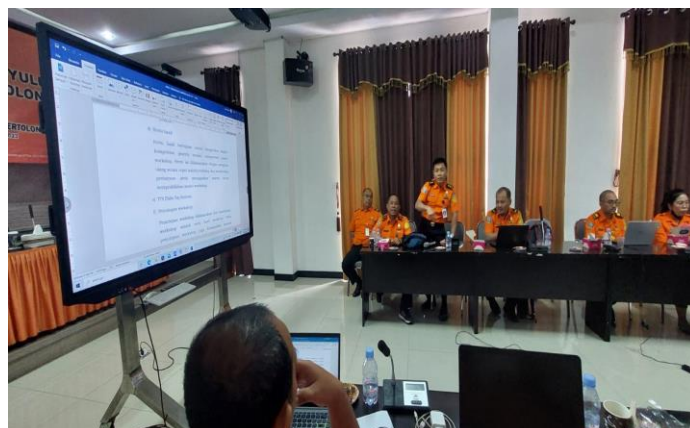
c. Persentase NSPK Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan yang tersusun

Adapun kegiatan-kegiatan untuk mendukung indikator tersebut antara lain:

1) Penyusunan Petunjuk Teknis Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan

Kegiatan ini diselenggarakan di Lampung pada September 2023. Adapun tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk:

- ✓ Terbahasnya draf Petunjuk Teknis Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan;
- ✓ Terkumpulnya saran maupun masukan terhadap isi draf Juknis Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan;
- ✓ Tersusunnya draf Petunjuk Teknis Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan berdasarkan hasil saran maupun masukan peserta rapat;
- ✓ Tersosialisasinya draf Petunjuk Teknis Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan kepada personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung.



Gambar 3.8. Foto kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Lampung

Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan rapat penyusunan Petunjuk Teknis Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan yaitu:

- ✓ Tersusunnya draf penyusunan Petunjuk Teknis Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan berdasarkan hasil saran dan masukan peserta rapat;
- ✓ Tersosialisasinya draf Petunjuk Teknis Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan kepada personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung.

2) Penyusunan Pedoman Seragam Tugas dan Tanda Kecakapan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Kegiatan ini diselenggarakan di kota Surakarta pada Juni 2023. Adapun tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan draf Pedoman Seragam Tugas dan design Seragam Tugas yang telah disusun oleh Direktorat Bina Potensi kepada perwakilan Potensi Pencarian dan Pertolongan di wilayah Solo Raya, sehingga diperoleh masukan dan tanggapan tentang Seragam Tugas yang akan digunakan oleh Potensi Pencarian dan Pertolongan. Adapun tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk:

- a. Memberikan sosialisasi peraturan tentang Seragam Tugas Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- b. Masukan terhadap isi draf yang telah disusun;
- c. Masukan tatacara penulisan bahasa hukum dalam draf pembahasan;
- d. Masukan terhadap design Seragam Tugas;
- e. Mendapatkan kesepakatan bersama tentang Seragam Tugas.



Gambar 3.9. Foto kegiatan Penyusunan Pedoman Seragam Tugas dan Tanda Kecakapan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Surakarta

Adapun output yang dihasilkan dari rapat Penyusunan Pedoman Atribut Potensi Pencarian dan Pertolongan yaitu:

- ✓ Disepakatinya design Seragam Tugas Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- ✓ Disepakatinya isi draf Pedoman Seragam Tugas Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- ✓ Tersosialisasinya draf Pedoman Seragam Tugas Potensi Pencarian dan Pertolongan;

3) Pembuatan Modul Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan

Kegiatan ini diselenggarakan di Banten pada Oktober 2023. Adapun tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan penyusunan Modul Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan. Adapun tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk:

- ✓ Terbahasnya draf Modul Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan;
- ✓ Terkumpulnya saran maupun masukan terhadap isi draf Modul Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan;
- ✓ Tersusunnya draf Modul Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan berdasarkan hasil saran maupun masukan peserta rapat;
- ✓ Tersosialisasinya draf Modul Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan kepada personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung.



Gambar 3.10. Foto kegiatan Pembuatan Modul Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan di Banten

Adapun output yang Pembuatan Modul Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan yaitu:

- ✓ Draf penyusunan modul Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan berdasarkan hasil saran dan masukan peserta rapat
- ✓ Tersosialisasinya draf modul Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan kepada personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung.

d. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan

Adapun kegiatan-kegiatan untuk mendukung indikator tersebut antara lain:

1) SAR Goes to School

Program *SAR Goes to School* ini sangat relevan sebagai upaya preventif dalam rangka memberikan edukasi guna meminimalisir jumlah korban jiwa khususnya kepada anak-anak saat terjadi keadaan darurat. Selain itu, anak-anak (khususnya tingkat TK/SD, SMP dan SMA) juga mendapatkan bekal keterampilan dasar di bidang Pencarian dan Pertolongan agar mereka dapat menyelamatkan diri sendiri, atau mampu memberikan bantuan dasar kepada orang-orang di sekitarnya saat terjadi keadaan darurat.

Pada tahun ini, program *SAR Goes to School* dilaksanakan di beberapa Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan total keseluruhan jumlah peserta selama tahun 2023 sebanyak 677 orang dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Pangkalpinang= 80 orang
- ✓ Tanjung Pinang= 80 orang
- ✓ Palembang= 80 orang
- ✓ Manado= 70 orang
- ✓ Maumere= 80 orang
- ✓ Ambon=80 orang
- ✓ Biak= 77 orang
- ✓ Lampung= 80 orang
- ✓ Bandung= 50 orang



Gambar 3.11. Kegiatan SAR Goes to School yang diselenggarakan tahun 2023

Selain program *SAR Goes to school* yang dilaksanakan oleh UPT, terdapat juga kegiatan permintaan *SAR Goes to school* dan kunjungan ke Kantor Pusat yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Potensi di tahun 2023 dengan total peserta sebanyak 2251 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan SAR Goes to School
 - ✓ Sekolah Avicena= 1050 orang
 - ✓ Sekolah Bangun Mandiri= 209 orang
 - ✓ Sekolah Budi Luhur= 370 orang
 - ✓ SMPN 187 Jakbar= 432 orang
2. Kunjungan ke Kantor Pusat BASARNAS
 - ✓ TK Mahatma Gandhi= 27 orang
 - ✓ TK Sunter Mulia= 27 orang
 - ✓ TK Aisyiyah 39= 24 orang
 - ✓ TK Kristen Kanaan= 29 orang
 - ✓ TK Santo Markus= 67 orang
 - ✓ TK Bentara Indonesia= 16 orang

2) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemandirian masyarakat menghadapi kondisi kedaruratan. Seiring dengan meningkatnya frekuensi dan kompleksitas bencana alam serta perubahan iklim yang dapat meningkatkan risiko darurat, Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan menjadi semakin penting. Masyarakat setempat merupakan sumber daya pertama yang tersedia dalam kondisi darurat dan mampu memberikan tanggapan cepat sebelum bantuan eksternal tiba. Dengan memberdayakan masyarakat, potensi masyarakat dapat dimaksimalkan dalam menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh berbagai jenis bencana dan kondisi darurat.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2023 diselenggarakan oleh Kantor Pusat BASARNAS dan 4 Unit Pelaksana Teknis. Adapun untuk Kantor Pusat, terdapat 4 (empat) kelompok masyarakat yang diberdayakan dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Masyarakat Desa Dukun (KPP Semarang) pada bulan Juli yang diikuti sebanyak 100 orang
- ✓ Masyarakat Desa Way Muli Timur (KPP Lampung) pada bulan Oktober yang diikuti sebanyak 100 orang

- ✓ Masyarakat Desa Karangtawang (KPP Cilacap) pada bulan November yang diikuti sebanyak 100 orang
- ✓ Masyarakat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (KPP Yogyakarta) pada bulan November yang diikuti sebanyak 100 orang



Gambar 3.12. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat yang diselenggarakan tahun 2023

Selain diselenggarakan oleh Kantor Pusat, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat juga dilaksanakan oleh 4 (empat) UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagai benchmarking (penolokukuran) kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di UPT lainnya. Berikut kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh UPT di Tahun 2023:

- ✓ Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya yang diikuti sebanyak 100 orang
- ✓ Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu yang diikuti sebanyak 75 Orang
- ✓ Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar yang diikuti sebanyak 75 orang
- ✓ Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram yang diikuti sebanyak 75 orang

3) SAR Community

Dalam rangka mempercepat penyebaran informasi dan sebagai bentuk diseminasi pencarian dan pertolongan (SAR) kepada komunitas, diperlukan kegiatan berupa workshop yang bersifat teknis kepada para anggota komunitas. Untuk itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) melalui Direktorat Bina Potensi menyelenggarakan kegiatan Pembinaan SAR Community.



Gambar 3.13. Kegiatan SAR Community yang diselenggarakan tahun 2023

Pembinaan *SAR Community* tahun 2023 dinisiasi oleh Kantor Pusat BASARNAS dengan 8 (delapan) komunitas di wilayah kerja UPT BASARNAS di beberapa wilayah di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 464 (empat ratus enam puluh empat) anggota komunitas dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Komunitas Pemadam (Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak) sebanyak 30 orang
- ✓ Komunitas Sai Rescue (Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar) sebanyak 50 orang
- ✓ Komunitas TRC PB Balangan (Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin) sebanyak 40 orang
- ✓ Komunitas SAKA SAR (Balai Pelatihan SDM BASARNAS) sebanyak 52 orang
- ✓ Komunitas Banda (Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan) sebanyak 75 orang
- ✓ Komunitas Operator Wisata (Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang) sebanyak 71 orang

- ✓ Komunitas Kendaraan Adventure (Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar) sebanyak 75 orang
- ✓ Komunitas RAPI (Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya) sebanyak 71 orang

4. Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) target kinerja yang capaiannya melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang kinerjanya melampaui target yaitu:

a. Persentase kenaikan jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan

Indikator kinerja ini melampaui target disebabkan peran partisipasi Masyarakat terhadap dukungan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan sangat baik karena BASARNAS telah melakukan penyuluhan pemberdayaan kelompok Masyarakat untuk daerah rawan bencana sebagai Upaya mitigasi bencana. Selain itu Tingkat kesadaran Masyarakat terhadap kemanusiaan yang mengalami bencana semakin tinggi dibuktikan dengan nilai survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan SAR.

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan

Indikator kinerja ini melampaui target disebabkan karena pelayanan SAR terhadap Masyarakat khususnya di daerah rawan bencana dianggap penting oleh Masyarakat, mudah diakses, dan tidak dipungut biaya

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.

Dalam melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya, BASARNAS menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat bekerja sendiri melainkan keterkaitan dengan potensi yang ada di wilayah rawan bencana melalui forum koordinasi potensi pencarian dan pertolongan dan pemberdayaan kelompok masyarakat pencarian dan pertolongan pengkoordinasian dan

dukungan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dapat terlaksana dengan maksimal.

Direktorat Bina Potensi bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi melakukan inovasi dengan cara pengembangan aplikasi Sistem Bina Potensi yang menjadi program aplikasi berbasis digital sehingga Masyarakat dapat berperan aktif mengakses aplikasi dalam Upaya peningkatan penyelenggaraan operasi SAR.

6. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2023 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan pada 2023 dan anggaran yang menunjang kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing.

Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan peningkatan SDM Potensi yang memahami dan berpartisipasi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Kegiatan-kegiatan tersebut terdapat dalam KRO QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat yakni Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai sasaran di Direktorat Bina Potensi, Anggaran Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah dilakukan *automatic adjustment* hingga akhir tahun dengan total anggaran sebesar Rp15.290.597.000,-. Hal tersebut secara keseluruhan menggambarkan daya serap anggaran telah tercapai untuk Direktorat Bina Potensi

Adapun persentase realisasi anggaran dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan di Direktorat Bina Potensi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	200.000.000	168.292.660	84,1
Persentase kenaikan jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan	11.470.242.000	9.984.623.130	87
Persentase NSPK Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan yang tersusun	600.000.000	501.963.144	83,7
Tingkat Partisipasi Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	2.398.216.000	2.089.419.021	87,1

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Direktorat Bina Potensi

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja instansi pemerintah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya unit kerja Direktorat Bina Potensi tahun 2023 ini merupakan hasil pelaksanaan program kegiatan yang memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Bina Potensi.

Tersusunnya laporan akuntabilitas ini disadari belum sempurna, untuk mewujudkan pencapaian dan peningkatan kinerja Direktorat Bina Potensi akan melakukan penyempurnaan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar mencapai hasil yang maksimal.

Laporan Kinerja Tahun 2023 yang telah tersusun ini diharapkan dapat memperlihatkan pelaksanaan kinerjanya dan mendorong adanya peningkatan kinerja yang dapat diimplementasikan pada program kerja berikutnya.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. Mochamad Hernanto, M.M.

Jabatan : Direktorat Bina Potensi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Moh. Barokna Haulah

Jabatan : Deputy Bidang Bina Tenaga dan Potensi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Moh. Barokna Haulah
Pembina Utama Muda (IV/c)

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama,

Drs. Mochamad Hernanto, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DIREKTORAT BINA POTENSI

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	88
		Persentase kenaikan jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan	100%
2.	Meningkatnya kualitas Norma, Standar, Kriteria, dan Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	Persentase NSPK Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan yang tersusun	100%
3.	Meningkatnya jumlah masyarakat yang antusias terhadap keselamatan diri	Tingkat Partisipasi Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	100%

Pagu Anggaran

: Rp 3.965.500.000,-

Terbilang : Tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah.

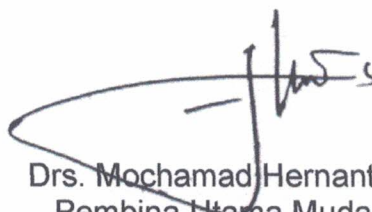
Jakarta, Januari 2023

Deputi Bidang Bina Tenaga
dan Potensi,



Moh. Barokna Haulah
Pembina Utama Muda (IV/c)

Direktur Bina Potensi,



Drs. Mochamad Hernanto, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)

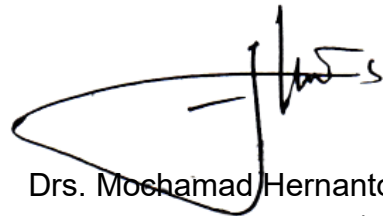
PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT BINA POTENSI

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	88	88	100%
	Persentase kenaikan jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	130%	130%
Meningkatnya kualitas Norma, Standar, Kriteria, dan Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	Persentase NSPK Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan yang tersusun	100%	100%	100%
Meningkatnya jumlah masyarakat yang antusias terhadap keselamatan diri	Tingkat Partisipasi Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	100%	108%	108%
CAPAIAN RATA-RATA				109,5%

PAGU ANGGARAN : Rp15.290.597.000,00

REALISASI ANGGARAN : Rp13.125.601.223,00

Direktur Bina Potensi,



Drs. Mochamad Hernanto, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav 2-3 Jakarta 10720
<https://basarnas.go.id>
E-mail: basarnas@basarnas.go.id

Telp : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 – (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

Nomor : B/329/PR.02.02/I/BSN-2024 Jakarta, 17 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penetapan Predikat Kinerja Tahunan Organisasi Tahun 2023

Yth. Direktur Bina Potensi
di
Jakarta

Menunjuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja ASN, perlu ditetapkan predikat kinerja organisasi sebagai dasar evaluasi kinerja pegawai di masing-masing unit kerja. Predikat kinerja organisasi tersebut diperoleh dari capaian indikator kinerja, ekspektasi pimpinan, serta upaya perubahan proses/inovasi yang berdampak pada peningkatan hasil kerja unit kerja.

Terkait hal di atas, terlampir disampaikan Penetapan Predikat Kinerja Tahunan Organisasi Direktorat Bina Potensi Tahun 2023. Selanjutnya predikat kinerja dimaksud dapat digunakan sebagai dasar penetapan sebaran predikat kinerja individu.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Bina Tenaga dan
Potensi Pencarian dan
Pertolongan,



Moh. Barokna Haulah, S.S.
Pembina Utama Madya (IV/d)

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
2. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Lampiran Surat Deputi Bidang Bina Tenaga
dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
Nomor : B/329/PR.02.02/I/BSN-2024
Tanggal : 17 Januari 2024

PENETAPAN PREDIKAT KINERJA TAHUNAN
PERIODE TAHUN 2023

NAMA SATUAN ORGANISASI	PREDIKAT KINERJA
Direktorat Bina Potensi	BAIK

HASIL (PK dan Delivery
Ekspektasi

A = diatas ekspektasi	Kurang	Baik	Istimewa
S = sesuai ekspektasi	Kurang	Baik	Baik
B = dibawah ekspektasi	Sangat Kurang	Butuh Perbaikan	Butuh Perbaikan
	B = dibawah ekspektasi	S = sesuai ekspektasi	A = diatas ekspektasi

PROSES

Deputi Bidang Bina Tenaga dan
Potensi Pencarian dan
Pertolongan,



Moh. Barokna Haulah, S.S.
Pembina Utama Madya (IV/d)